

**PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MENUJU PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Gilang Putra Ramadhan

NPP. 31.0623

Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: gilangputraram7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author sees that in the implementation of elections in Palangka Raya City in the previous year it could be said that the level of community participation was still less than optimal or unstable. Therefore, the Palangka Raya City KPU has the authority to disseminate information to the public. With the increasingly modern era of society, it has become easier and more of a challenge for the General Election Commission of Palangka Raya City to increase the political participation of the community so that they can be involved in political activities based on the implementation of election activities in the previous year and then adjusted to the conditions that exist in society today.* **Purpose:** *This research aims to find out what factors influence the process of increasing the political participation of the people of Palangka Raya City by the General Election Commission of Palangka Raya City.* **Method:** *The research design is qualitative research with descriptive methods. The data collection technique in this research is by conducting interviews and documentation.* **Results:** *The results of this research show that increasing community political participation in the City of Palangka Raya has been carried out with good efforts, starting from related parties as well as the local community and organizations which synergize well with the General Election Commission of the City of Palangka Raya with the latest innovations and adequate facilities.* **Conclusion:** *So that the improvement process carried out by the Palangka Raya City General Election Commission has been carried out with good planning and implementation.*

Keywords: *General Election Commission, Increasing, Politic, Political Participation.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan pemilu di Kota Palangka Raya tahun sebelumnya dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat masih kurang optimal atau belum stabil. Oleh karena itu, KPU Kota Palangka Raya mempunyai kewenangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan semakin modernnya era masyarakat, semakin mudah dan menjadi tantangan bagi KPU Kota Palangka Raya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar dapat terlibat dalam kegiatan politik berdasarkan penyelenggaraan kegiatan pemilu. pada tahun sebelumnya kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat saat ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya. **Metode:** Desain penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kota Palangka Raya telah dilakukan dengan upaya yang baik, dimulai dari pihak terkait serta masyarakat setempat dan organisasi yang bersinergi baik dengan KPU Kota Palangka Raya dengan inovasi terkini dan fasilitas yang memadai. **Kesimpulan:** Agar proses perbaikan yang dilakukan KPU Kota Palangka Raya telah terlaksana dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Peningkatan, Politik, Partisipasi Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi yang selalu mengupayakan pelaksanaan demokrasi pada kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan) (Gaffar, 2017), bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam berpolitik di pemerintahan yang demokratis ini.

Pemilu menjadi bagian terpenting dalam kokohnya demokrasi, dimana rakyat dapat terlibat langsung dalam menentukan arah dari kebijakan politik negara untuk pemerintahan yang berjalan ke depannya dalam satu periode. Pada dasarnya keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengontrol jalannya Pemerintahan kedepannya, yang artinya masyarakat berhak dalam menentukan rasa kepercayaannya kepada pilihan mereka yang menurut mereka layak untuk dipercaya sebagai penjalannya roda Pemerintahan kedepannya. Selain itu keikutsertaan masyarakat dalam politik juga merupakan suatu bentuk eksistensi individu atau kelompok di masyarakat dalam mengekspresikan dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. (Putri, 2016)

KPU Kota Palangka Raya mempunyai target kinerja yang menjadi tolok ukur yang akan dicapai oleh unit kerja dari setiap indikator kinerja yang ada untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok serta untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator dari Sasaran Strategis KPU Kota Palangka Raya terdapat di tabel di bawah ini.

Tabel 1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Palangka Raya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%

Sumber: Data diolah dari Renstra KPU Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan Tabel 1, Rencana strategis KPU Kota Palangka Raya merupakan suatu komitmen bersama untuk dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Demikian diharapkan dapat meningkatkan motivasi seluruh pegawai untuk dapat berhasil dalam mewujudkan visi dan misi dari KPU Kota palangka Raya yang telah dirumuskan dan ditetapkan. (Raya, 2024)

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat Kota Palangka Raya Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2018-2020

NO	Pemilihan di Kota Palangka Raya	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Persentase (%)
1.	Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018	176.823	117.047	66,12%
2.	Pemilu Serentak Tahun 2019	181.982	154.700	83,73%
3.	Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	180.771	113.575	63%

Sumber : 1. Data Diolah.(KPU Kota Palangka Raya Tahun 2023)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pada pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Palangka Raya hanya mencapai 66,12% di bawah target dari 77,5%. Yang artinya tingkat partisipasinya pada pilkada Walikota dan Wakil Walikota tidak memenuhi target, serta Pemilu serentak Tahun 2019 sudah mencapai target, yaitu 83,73% dari 77,5%. Dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 tingkat partisipasinya kembali turun ke 63% dari 77,5%.

Berdasarkan dari data perbandingan pemilu di Kota Palangka Raya pada tahun 2018-2020 pada pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum serentak, maka muncul permasalahan dimana partisipasi publik yang tidak stabil, maka dari itu KPU Kota Palangka Raya mengatakan bahwa partisipasi Pemilu Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 77,5%. Maka dari itu, penulis dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun sebelumnya dikatakan masih kurang maksimal tingkat partisipasinya.

Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palangka Raya Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Pahandut	266	34.649	35.168	69.817
2	Jekan Raya	430	54.495	66.013	110.508
3	Bukit Batu	44	5.204	5.100	10.304
4	Sabangau	73	9.135	8.853	17.989
5	Rakumpit	14	1.511	1.295	2.806
Total		827	104.994	116.429	211.424

Sumber: Data DPT KPU Kota Palangka Raya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 211.424 pemilih. Ketua KPU Kota Palangka Raya, Ngismatul Choiriyah pada rapat pleno terbuka menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kota Palangka Raya dihadiri oleh pihak terkait, maka dari itu ditetapkanlah Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Palangka Raya dengan 104.994 pemilih laki-laki dan 116.429 pemilih perempuan. Dari data tersebut, dapat dikatakan jumlah pemilih di Kota Palangka Raya ini didominasi oleh pemilih perempuan dengan sebanyak 50,3%, sedangkan pemilih laki laki sebanyak 49,7%. Para pemilih yang sudah masuk dalam DPT itu sudah tersebar ke 30 Kelurahan dari lima kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya. Dari seluruh kelurahan yang ada, KPU telah menetapkan sekitar 827 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilu tahun 2024. Sehingga pemilih dari Kota Palangka Raya yang sebanyak 211.424 ini akan tersebar ke lima kecamatan di Kota Palangka Raya. Para pemilih ini akan menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing yang telah ditetapkan. (Antaraneews.com, 2020)

Berdasarkan data di atas maka penulis melihat bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Palangka Raya pada tahun ke tahun sebelumnya bisa dikatakan masih kurang maksimal atau tidak stabil tingkat partisipasi masyarakatnya. Maka dari itu, KPU Kota Palangka Raya berwenang dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas KPU itu sendiri yang ditegaskan dalam PKPU RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Komisi Pemilihan Umum, 2022). Seperti terdapat pada Bab 1 pasal 1 poin 15 yang berbunyi, “Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan.” Dan Bab 1 pasal 1 poin 16 yang berbunyi, “Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pemilu atau Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu dan/atau Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yang merupakan suatu upaya untuk menambah wawasan dan memperluas jangkauan pengetahuan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian pada jurnal (Suprapti, 2019), dengan judul “Upaya Sosialisasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Kota Palangka Raya” yang menjelaskan bahwa upaya peningkatan peran masyarakat dalam membangun politik di Kota Palangka Raya oleh KPU Daerah. Penelitian ini memiliki kesamaan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan perbedaan dari penelitian ini adalah topik penelitian yang lebih membahas untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya ini lebih merujuk ke upaya sosialisasinya untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat. Hasil penelitian pada skripsi (HERLINDA, 2021), dengan judul “Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020”, Hasil dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada tahun 2005 adalah 63,20%, pada tahun 2010 adalah 54%, pada tahun 2015 adalah 52,27%, pada tahun 2020 adalah 61,15%. Persamaan dari penelitian ini adalah metode yang menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terdapat di lokus penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian pada jurnal (Dedi, 2019), dengan judul “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”, Menjelaskan bahwa sistem pemilu yang baik harus dibangun dengan memperhatikan kualitas dari penyelenggaraan pemilu, baik proses maupun hasilnya. Penelitian ini sama dengan jurnal yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Tetapi, fokusnya yang berbeda yaitu terkait partisipasi politik dan penelitian sebelumnya adalah analisis sistem dari pemilu tersebut. Hasil penelitian pada skripsi (Ardhie, 2019), dengan judul “Peranan Komisi Pemilihan Umum

Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015”, menjelaskan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih di pemilihan Kepada Daerah Walikota Medan Tahun 2015 kurang memuaskan. Penelitian ini memiliki persamaan, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah terdapat pada lokus penelitian yaitu di Kota Medan pada Tahun 2015. Hasil penelitian pada jurnal (Santoso, 2019), dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas”, menjelaskan bahwa KPU dan partai politik memiliki peranan yang dominan dalam mewujudkan tercapainya pemilu yang berkualitas. Kesamaan dari teori sebelumnya ini adalah membahas tentang peranan dari KPU dan perbedaannya ada pada fokus yang berbeda yaitu lebih menekankan untuk mewujudkan demokrasi berintegritas. Hasil penelitian pada jurnal (Halilah, 2022), dengan judul “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput”. Dari penelitian ini diperolehnya suatu strategi sosialisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sumenep dalam menurunkan angka golput pada pemilu 2019. Pada penelitian sebelumnya ini pun memiliki kesamaan pada metode penelitian yaitu metode deskriptif dan topik penelitian. Perbedaannya dari penelitian ini terdapat pada lokus penelitian yang diteliti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian pada jurnal (Silalahi, 2022), dengan judul “Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”, menjelaskan bahwa sangat diperlukannya membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan pemilu dengan mempersiapkan dua *scenario*, yaitu antisipasi jika Covid-19 masih mewabah atau harus diatur dalam peraturan perundang-undangan berhubungan dengan force majeure/keadaan memaksa/*overmatch*. Persamaan dari penelitian ini adalah topik penelitian yang merujuk pada peran KPU dalam Pemilu serentak dan perbedaannya terdapat pada metode penelitian, yaitu penelitian hukum yuridis normatif, yang mana Teknik pengumpulan datanya melalui dokumen-dokumen maupun kepustakaan terhadap data bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian pada skripsi (Muhamad, 2022), dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021”, dapat disimpulkan bahwa partisipasi di penelitian ini mengalami peningkatan berdasar jumlah angka partisipasi yang mencapai 67,3%, jika dibanding dengan tahun 2015 yang mengalami penurunan hingga mencapai 57,34% ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat dalam berpartisipasi pemilu mengalami peningkatan. Persamaan dari penelitian sebelumnya ini adalah sama sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan perbedaannya terdapat pada lokus penelitian yang dilaksanakan di Mataram. Hasil penelitian pada jurnal (Putri, 2016), dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur”. Dapat diketahui bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan sosialisasi interaksional dan sosialisasi *directional*. Persamaannya adalah kesamaan pada metode yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dan perbedaannya terdapat pada hasil dan topik penelitian yang dimana topiknya berfokus pada pentingnya peran kpu dalam memberikan sosialisasi terkait pemilu. Hasil penelitian pada jurnal (Dewi, Sinaga, Pratiwi, & Widiyasono, 2022), dengan judul “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput”, yang menjelaskan bahwa KPU memegang peranan penting dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat serta berperan untuk meminimalisir golput yang disebabkan oleh ke apatis-an oleh masyarakat. Kesamaan dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif dan perbedaannya adalah pada lokus yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, dengan menggunakan Untuk menganalisis permasalahan di atas, penelilit menggunakan konsep teori menurut Milbarth dalam Maran, terkait faktor utama dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, hal ini dikarenakan teori tersebut memiliki keterikatan terhadap penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, yaitu membahas bagaimana peningkatan partisipasi politik masyarakat oleh KPU pada pemilu.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat Kota Palangka Raya Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Untuk mengetahui bagaimana upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. METODE

Penelitian ini disusun dengan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana peningkatan partisipasi politik masyarakat oleh KPU pada pelaksanaan pemilu dengan penggambaran yang akurat dan mendalam yang berdasarkan fakta yang diteliti di lapangan. Penelitian ini di lakukan dengan cara mengumpulkan data, lalu data tersebut dianalisa sehingga dapat ditariknya suatu simpulkan dari penelitian ini. Sumber data haruslah ada informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menentukan informan dengan metode purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sumber informan dalam penelitian ini antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Staff Bagian Analisis Kepemiluan, Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pemilih, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas, Masyarakat Umum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yakni teori Milbrath (Maran, 2007), menggunakan pengukuran empat dimensi yakni Peran Kedudukan, Harapan Peran, Peran Nyata, dan Perilaku Peran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Kota Palangka Raya

A. Faktor Pendukung

1. Perangsang Masyarakat

Perangsang masyarakat merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu individu agar terlibat aktif dalam kegiatan politik. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan bahwa sejauh ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya dalam mensosialisasikan untuk mendorong partisipasi politik masyarakat menuju pemilu tahun 2024 dengan cara tatap muka ataupun secara daring yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sebagai bentuk pengingat bahwa pemilu 2024 akan segera dilaksanakan. Tatap muka dilakukan secara langsung dengan mengadakan seminar, menjadi Pembina apel pagi, forum diskusi secara langsung yang dibuat menarik dan kekinian agar masyarakat tertarik untuk berpartisipasi lebih pada pemilu tahun 2024. KPU Kota Palangka Raya juga aktif dalam sosial media melalui Instagram, TikTok, dan Youtube.

Masyarakat juga merasakan langsung dampak positif dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini. Sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam jurnalnya (Suprpti, 2019), mengatakan “KPU Kota Palangka Raya selaku penyelenggara dari pelaksanaan pemilu mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan politik di Kota Palangka Raya, karena pemilu merupakan bentuk pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palangka Raya”.

Tabel 4. Kegiatan sosialisasi KPU Kota Palangka Raya

No	Tanggal	Kegiatan
1.	24 November 2023	Kadiv Sosdilihparmas memberi pendidikan kepemiluan di pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
2.	27 November 2023	Memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula, KPU menjadi Pembina upacara di SMK Negeri 2 Kota Palangka Raya
3.	6 Desember 2023	Sosialisasi pemilu Tahun 2024 kepada ormas tingkat Kota Palangka Raya
4.	14 Desember 2023	Release video sosialisasi dan pendidikan pemilu oleh KPU Kota Palangka Raya untuk tahapan pemilu 2024
5.	17 Desember 2023	KPU Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi pemilu 2024 pada organisasi mahasiswa se-Kota Palangka Raya
6.	18 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> KPU Kota Palangka Raya melakukan siaran keliling mengingatkan untuk jangan lupa ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. KPU Kota Palangka Raya mengadakan nobar “Kejarlah Mimpi” di Taman Wisata Pasuk Kameloh Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk menjangkau lapisan masyarakat agar dapat memahami tentang kepemiluan dari film ini.
7.	22 Desember 2023	KPU Kota Palangka Raya mengadakan nobar film “Kejarlah Janji” di Halaman Kelurahan Kelampangan
8.	4 Januari 2024	Sosialisasi pemilu 2024 kepada dharma wanita
9.	9 Januari 2024	KPU Kota Palangka Raya mengadakan kegiatan “Ngopi” Ngobrol Pemilu Lintas Sektoral Kesiapan Pemilu 2024 dengan tema #TemanPemilih via zoom meeting yang dihadiri semua Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
10.	19 Januari 2024	KPU Kota Palangka Raya menghadiri undangan sebagai pemateri di SMA Negeri 2 Palangka Raya untuk mensosialisasikan kepada siswa siswi terkait pemilih pemula
11.	3 Februari 2024	KPU Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan sosialisasi simulasi pemungutan suara di TPS kepada Polresta Palangka Raya.

Sumber: Data diolah (Instagram KPU Kota Palangka Raya) Tahun 2023-2024

2. Karakteristik Sosial Individu

Karakteristik sosial dari tiap individu masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Karakteristik sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yang sesuai dengan kebutuhan dari tiap individu masyarakat dalam menentukan calon yang pemimpin yang akan membantu mereka dalam memperoleh kesejahteraannya.

Berdasarkan hasil wawancara bisa dikatakan KPU Kota Palangka Raya melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dibantu oleh perangkat daerah yang ada di masyarakat. Hal ini juga dibuktikan melalui wawancara dari salah satu masyarakat dan ketua KPPS yang juga turut langsung aktif dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat. Sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam jurnalnya (Wijaksono, 2013), bahwa “kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi perilaku masyarakatnya”. Sehingga diperlukannya pemahaman secara langsung oleh perangkat daerah dan panitia pemilih secara langsung untuk memberikan pemahaman melalui pendekatannya kepada masyarakat.

3. Situasi dan Lingkungan Politik

Penetapan suatu kebijakan harusnya didasarkan dari bagaimana situasi yang terjadi langsung di lapangan dan sesuai dengan kondisi di masyarakat. Dalam upayanya KPU Kota Palangka Raya dengan menetapkan kebijakan yang memudahkan seluruh masyarakat di Kota Palangka Raya dalam proses pelaksanaan menuju pemilu tahun 2024. Kebijakan yang ditetapkan oleh KPU Kota Palangka Raya sendiri dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memberikan akses dan fasilitas yang mencukupi kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Berdasarkan dari hasil wawancara sudah adanya kerja sama yang baik antara KPU Kota Palangka Raya dengan petugas pemilu untuk menciptakan lingkungan yang antusias untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang memiliki kendala secara fisik maupun mental dalam pemilihan nantinya. Hal ini didukung oleh data jumlah pemilih disabilitas di Kota Palangka Raya.

Terkait penyandang disabilitas penting untuk memahami tantangan dan kebutuhan mereka, serta untuk merancang kebijakan dan program yang lebih inklusif dan efektif untuk meningkatkan akses, dukungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, pemerintah dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua. “Dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih diperlukannya kesadaran politik”, sehingga sosialisasi diperlukannya keterlibatan dari penyelenggara yaitu KPU Kota Palangka Raya dan panitia pemilih yang menjadi duta sosialisasi pada masyarakat yang berbasis di Kecamatan dan desa”. (Raden, Kurnia, & Massi, 2019).

4. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman terkait hak-hak dan kewajiban, serta cara-cara agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan polititik. Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kesadaran politik warga dan dapat turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu pemilu. Karena pendidikan politik juga merupakan suatu pilar yang penting dalam membangun masyarakat yang aktif secara politik.

Berdasarkan hasil wawancara bisa dikatakan KPU berhasil dalam memberikan pendidikan politik yang dilakukan secara tatap muka secara langsung ataupun online yang langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk pemilih pemula yang baru dapat memilih pada pemilu tahun 2024 nanti. Sejalan pada penelitian sebelumnya bahwa “Pendidikan politik yang kurang dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pemilu” (Megawati & Pandang, 2020). Sehingga bisa dikatakan tanpa adanya pendidikan yang cukup maka suara dari pemilih bisa dengan mudah dibayar dengan uang dan benda lainnya. Maka, hasil dari itu pun hanya tertuju pada materi dan keuntungan personal.

Disimpulkan bahwa berdasarkan faktor pendorong partisipasi politik masyarakat menurut Milbrath (Maran, 2007) dan adanya wawancara yang dilakukan agar dapat menghasilkan data yang relevan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan beberapa kegiatan dengan cukup baik untuk mendorong partisipasi masyarakat Kota Palangka Raya untuk meningkatkan partisipasi poliitik masyarakat Kota Palangka Raya. Berdasarkan data yang telah didapatkan juga yang sesuai dengan faktor-faktor tersebut hal yang paling berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi secara berjangka dengan metode sosialisasi yang menarik agar masyarakat menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pemilu tahun 2024. “Partisipasi pemilih menjadi bagian penting dalam dalam penyelenggaraan pemilihan” (Raden et al., 2019). Sehingga bisa dikatakan semakin banyak partisipasi masyarakat Kota Palangka Raya maka semakin baik legitimasi proses dan hasil dari penyelenggaraan sebuah pemilihan.

B. Faktor Penghambat

Partisipasi masyarakat yang banyak menandakan adanya pelaksanaan demokrasi yang baik dan hal itu juga menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat telah sadar dan memahami masalah politik, serta turut aktif dalam kegiatan politik. Tetapi, dibalik kesadaran masyarakat yang sudah baik, masih terdapat juga tantangan khusus yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadikan penghalang bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Penulis akan menguraikan adanya faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat dalam menuju pemilu tahun 2024. Beberapa faktor diantaranya sebagai berikut.

1. Rendahnya Kepercayaan Politik Masyarakat

Penghambatan partisipasi politik masyarakat Kota Palangka Raya dilatangbelakangi karena adanya kekecewaan terhadap janji pemilu yang tidak terpenuhi setelah mereka terpilih. Rakyat merasa suaranya hanya dibutuhkan ketika pemilu sedang berlangsung, kemudian ketika telah berkuasa semua yang pernah dijanjikan akan diabaikan. Munculnya rasa tidak percaya ini juga disebabkan karena adanya penyelewangan yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik menjadi semakin kuat.

Dari hasil wawancara, bisa dikatakan terdapat sedikit perbedaan faktor yang menjadi penyebab masyarakat menjadi tidak percaya dengan proses pemilu. Yang dimana, dari pihak penyelenggara dan tokoh masyarakat menyampaikan salah satu faktornya adalah karena kurangnya transparansi yang menyebabkan banyaknya kecurangan pada pelaksanaan pemilu dan dari masyarakat langsung menyampaikan adanya ketidakpercayaan adalah dikarenakan politik hanyalah cara dari orang tersebut untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya atas kepentingan pribadi saja sehingga bisa melakukan berbagai cara agar dapat terpilih pada pemilu. Bisa disimpulkan bahwa tinggi rendahnya partisipasi masyarakat bergantung pada bagaimana penilaian masyarakat terhadap pemerintah. “Pemilu merupakan salah satu bentuk control dari masyarakat terhadap kekuasaan pada pemerintahan, dimana pergantian kekuasaan pemerintahan ini berdasarkan atas kehendak rakyat melalui pemilu” (Maria & Marendra, 2020). Karena kepercayaan dari masyarakat merupakan sebuah esensi yang penting bagi pembangunan pemerintahan di Indonesia, khususnya kemajuan di Kota Palangka Raya dan juga modal penting untuk berjalannya pemerintahan yang demokratis.

2. Latar Belakang Sosial Ekonomi

Selain kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu atau politik, faktor lain, salah satunya adalah ekonomi, karena masyarakat merasa terjebak dalam kemiskinan ekonomi dengan prioritas yang berbeda-beda sehingga tidak memiliki tenaga dan waktu untuk terlibat dalam politik. Karena Sebagian masyarakat tersebut harus menyesuaikan dengan segi pekerjaan dan pendapatan yang didapat, sehingga adanya perhitungan yang harus dipertimbangan agar dapat terlibat dalam partisipasi politik.

Berdasarkan wawancara di atas, tuntutan perekonomian menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat dalam partisipasi politik. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk bekerja lebih keras bagaimana caranya mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut Setiadi dalam (Aprillia, Mintarti, & Utomo, 2016) “Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah kebudayaan, kelas sosial, status, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepercayaan dan sikap”.

3. Sistem Penyelenggaraan Pemilu

Sistem Penyelenggaraan pemilu khususnya administrasi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakhadiran pemilih dalam kegiatan pemilihan. Hal ini berkaitan dengan sistem

administrasi pemilu yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih dikarenakan tidak terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menggali pandangan dari salah satu masyarakat terkait bagaimana masalah administrasi yang menjadi penghambat dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Wawancara diatas juga berisikan pengalaman pribadi terkait rumitnya administrasi pemilu tersebut. Seperti yang disampaikan menurut Abdul Kadir dalam (Mulyanto Angkat, Kadir, & Isnaini, 2018), mengatakan “Administrasi menjadi suatu hal yang penting karena selalu berhubungan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia”. Dibalik rumitnya administrasi yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini juga kemungkinan terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya untuk mengupdate status kependudukannya dan juga mobilitas masyarakat yang tinggi yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menugurus segala macam administrasi kependudukan.

Dapat disimpulkan berdasarkan wawancara di atas, beberapa hambatan di atas merupakan beberapa hambatan yang menjadi penyebab kenapa peningkatan partisipasi politik masyarakat bisa menjadi tidak maksimal sehingga menjadi suatu hal penting yang perlu menjadi perhatian lebih oleh pihak terkait dan masyarakat.

3.2. Upaya Komisi Pemilihan Umum

Peranan Pemerintah, terkhususnya penyelenggara pemerintahan seperti KPU Kota Palangka Raya memiliki arti penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan demokrasi. Pandangan masyarakat terhadap pemerintah dan KPU Kota Palangka Raya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan setiap kegiatan demokrasi. Apabila masyarakat memandang pemerintah sudah baik dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka masyarakat pasti akan lebih aktif dalam suatu kegiatan demokrasi.

Maka diperlukannya upaya dari KPU Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan politik masyarakat menuju pemilihan umum 2024 di Kota Palangka Raya. Mengingat bahwa partisipasi masyarakat sangat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam pemilihan umum merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan pembangunan suatu daerah. Rendah atau tingginya partisipasi masyarakat merupakan tolok ukur dalam pembangunan politik dan kesejahteraan bangsa dan negara. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut:

A. Meningkatkan Sosialisasi

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkaitan dengan pengetahuan yang bersangkutan dengan minat dan perhatian suatu individu terkait lingkungan yang ada di masyarakat dan politik tentang dia hidup. Peningkatan pemahaman terkait pengetahuan berdemokrasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan jalannya pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil di Kota Palangka Raya merupakan bentuk dari kesadaran politik masyarakat yang berdasar pada pengalaman dan pengetahuan masyarakat tanpa adanya keterlibatan dari komponen politik.

Peningkatan masyarakat dengan kampanye sosialisasi ini yang efektif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai siaran langsung dari media sosial agar dapat menjangkau sebanyak mungkin orang

Dengan adanya kerja sama antara KPU Kota Palangka Raya dan pemerintah, tokoh masyarakat yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat dapat mengadakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat secara langsung yang bertujuan untuk integritas pemilu.

B. Perbaikan Tata Kelola Sistem Penyelenggaraan Pemilu

Salah satu indikator yang menjadi mendasar dalam berhasilnya suatu kualitas dari pelaksanaan pemilu yang demokratis adalah dengan adanya suatu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses berjalannya pelaksanaan pemilu, khususnya dalam proses pengawasan dan pemantauan pemilu.

Berdasarkan dari wawancara bisa disimpulkan upaya yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya dalam proses meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Palangka Raya adalah dengan melakukan beberapa hal, sebagai berikut.

1. Pembaruan Sistem Teknologi Pemilu

KPU Kota Palangka Raya dapat memperbarui sistem pemilu agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bisa meliputi penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pendaftaran pemilih, pemungutan suara, atau sistem lainnya yang dapat mempermudah proses pemungutan dan penghitungan suara. Contohnya adalah adanya aplikasi “sirekap” yang nantinya oleh KPSS untuk proses perekapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara.

Bisa disimpulkan bahwa sudah adanya upaya dari KPU Kota Palangka Raya terkait pembaruan teknologi dalam proses pelaksanaan pemilu, khususnya terkait keamanan data dan akses terjangkau bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat terkait penggunaan teknologi (McCormack, 2016), “peran teknologi adalah sebagai think tank kebijakan”. Yaitu bagaimana cara terbaik dalam memastikan bahwa penerapan teknologi di negara besar maupun negara kecil adalah dengan tujuan meningkatkan dan memperluas akses agar meningkatnya partisipasi, serta memperkuat kredibilitas demokrasi.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas dalam pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi data terkait pemilu, audit terbuka, serta penegakan hukum yang terjadi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa KPU Kota Palangka Raya telah melakukan segala upaya dengan cukup baik dengan selalu adanya keterbukaan terkait segala macam informasi yang ada terkait proses pemilu yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan tanggung jawab yang besar dalam mengatasi segala permasalahan yang ada dalam proses pemilu. Sejalan dengan pendapat menurut Alan, Dkk dalam (Wall et al., 2016), menyampaikan “pemanfaatan teknologi membawa manfaat yang besar dalam keakuratan, efisiensi, dan keefektifan proses administrasi dalam memperoleh transparansi dan akuntabilitas data”. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam proses pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Dengan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas pada proses pelaksanaan pemilu, masyarakat dapat mempunyai kepercayaan yang lebih terhadap pemilu dan integritas demokrasi dapat terjaga.

Dapat disimpulkan upaya KPU Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Palangka Raya sudah dilakukan dengan baik. Beberapa upaya terbaik yang dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya agar masyarakat Kota Palangka Raya dapat berpartisipasi aktif pada pemilu tahun 2024 adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang menarik sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat dan proses administrasi yang transparan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang ada dengan sistem administrasi yang menggunakan teknologi yang aktual.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sebagaimana yang diketahui didalam peningkatan partisipasi politik masyarakat diperlukannya peran aktif langsung dari masyarakat. Hal itu difungsikan agar masyarakat sendiri sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan politik. Peneliti menemukan suatu fenomena yang terjadi dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Palangka Raya di tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sebelumnya menunjukkan variasi, dengan beberapa kelompok menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada yang lain. Faktor-faktor seperti pendidikan, akses informasi, dan kepercayaan terhadap sistem politik mempengaruhi tingkat partisipasi ini dan juga Tantangan utama meliputi kepercayaan terhadap institusi politik, kesenjangan sosial, dan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Masyarakat Kota Palangka Raya memiliki harapan untuk melihat perubahan positif dalam sistem politik dan pelayanan publik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya menuju pemilihan umum 2024, dapat disimpulkan.

1. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Palangka Raya adalah sudah cukup baik. Bisa dilihat dari adanya program dan kegiatan yang seringkali dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya sesuai dengan dimensi yang peneliti gunakan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Palangka Raya dan antusias masyarakat dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada tersebut.
 - A. Faktor Pendukung
 - a. Perangsang Masyarakat
KPU Kota Palangka Raya dalam mensosialisasikan untuk mendorong partisipasi politik masyarakat menuju pemilu tahun 2024 dengan cara tatap muka ataupun secara daring
 - b. Karakteristik Sosial Individu
KPU Kota Palangka Raya juga melakukan sinergi dengan perangkat yang ada di masyarakat sekitar. bisa dikatakan KPU Kota Palangka Raya melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dibantu oleh perangkat daerah yang ada di masyarakat yang langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat.
 - c. Situasi dan Lingkungan Politik
Sudah adanya kerja sama yang baik antara KPU Kota Palangka Raya dengan petugas pemilu untuk menciptakan lingkungan yang antusias untuk masyarakat.
 - d. Pendidikan Politik
Bisa dikatakan KPU berhasil dalam memberikan pendidikan politik yang dilakukan secara tatap muka secara langsung ataupun online yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
 - B. Faktor Penghambat
 - a. Rendahnya kepercayaan politik masyarakat, Kepercayaan masyarakat bergantung pada bagaimana kinerja pemerintah dan penyelenggara pemerintah, khususnya KPU Kota Palangka Raya
 - b. Tuntutan ekonomi yang memaksa masyarakat untuk bekerja keras agar dapat mendapatkan pendapatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya
 - c. Sistem Penyelenggaraan Pemilu, khususnya Faktor administratif yang membuat masyarakat menjadi kesusahan sehingga berpengaruh dengan pemuktahiran dan akurasi pemilih masyarakat.
2. Upaya KPU Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Palangka

Raya sudah dilakukan dengan baik. Beberapa upaya terbaik yang dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya agar masyarakat Kota Palangka Raya dapat berpartisipasi aktif pada pemilu tahun 2024.

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi yang menarik sehingga dapat diakses dengan mudah sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap politik
- b. Perbaiki tata kelola administrasi yang meliputi, pembaruan dari sistem pemilu yang berkaitan dengan teknologi yang aktual agar memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, serta terciptanya transparansi dan akuntabilitas antara KPU Kota Palangka Raya dan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian yang dilakukan hanya 10 hari kerja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bahan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada peningkatan partisipasi politik daerah Kota Palangka Raya, sehingga memungkinkan ditemukannya wawasan yang lebih mendalam. Peneliti menyarankan agar studi lanjutan dilakukan di lokasi yang sama, terkait dengan partisipasi politik di Kota Palangka Raya, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Mengingat potensi yang dimiliki oleh Kota Palangka Raya, diharapkan partisipasi politik masyarakat dapat meningkat di masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Palangka Raya yang merupakan senior peneliti yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maran, R. R. (2007). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maria, L., & Marendra, D. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*. Bogor.
- McCormack, C. B. (2016). *Democracy rebooted: The future of technology in elections*.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Jakarta: Perludem.

Jurnal

- Aprillia, W., Mintarti, S. U., & Utomo, S. H. (2016). Pengaruh latar belakang sosial ekonomi orang tua, pendidikan ekonomi di keluarga dan economic literacy terhadap perilaku konsumsi mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Humaniora (JPH)*, 3(1), 78–84.
- Ardhie, G. D. (2019). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pilkada Kota Medan Tahun 2015.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 213–226. Diambil dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 36–48. Diambil dari

<https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>

- Halilah, S. (2022). ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT. *Siyasah : Hukum Tata Negara*, 5(Desember), 78–93.
- Megawati, & Pandang, A. T. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Siyasatuna*, 1(3).
- Muhamad, A. (2022). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021.
- Mulyanto Angkat, K., Kadir, A., & Isnaini, I. (2018). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 33. Diambil dari <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1260>
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Ejournal.Ilkom.Fisip-Ummul*, 4(1), 30–43.
- Raden, S., Kurnia, I., & Massi, R. (2019). *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah)*. Cakrawala Jogjakarta. Diambil dari https://perpustakaan.kpu.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OTFkMWRjMWI3YzA5ZTc5NjM5OThkZDYyZTQ0YmQ2YzkwYWYxYTE4YQ==.pdf
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 252–261. Diambil dari <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *JAPHTN-HAN*, 1(1), 67–79. Diambil dari <https://doi.org/2828-8378>
- Suprpti, W. (2019). UPAYA SOSIALISASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KOTA PALANGKA RAYA. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 1(2), 97–105.
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh Lama Tinggal dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman. *Journal ComTech BINUS*, 4(1).

Sumber Lainnya

- Antaraneews.com. (2020). Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kalteng 2020 capai 61,95 persen - ANTARA News. Diambil 31 Oktober 2023, dari <https://www.antaraneews.com/berita/1904116/tingkat-partisipasi-pemilih-di-pilkada-kalteng-2020-capai-6195-persen#mobile-src>
- Gaffar, J. M. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (2017).
- HERLINDA. (2021). Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020. Komisi Pemilihan Umum, (KPU). (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, 1–26. Diambil dari <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Raya, K. K. P. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024 (2024).